

ABSTRAK
KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN DINAS PERTANIAN
DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI

(Studi Kasus Kelompok Tani Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti

Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Oleh :

RIO NUSANTARA

NPM : 2152024

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Desa Fajar Jaya yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani, namun belum seluruhnya tergabung dalam kelompok tani. Dari 652 petani, hanya 286 yang aktif sebagai anggota kelompok tani, yang mencerminkan belum optimalnya pemberdayaan. Permasalahan utama terletak pada belum efektifnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian, yang ditandai oleh lemahnya sinkronisasi data, komunikasi tidak rutin, pembagian kerja tidak jelas, serta kurangnya evaluasi bersama.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola koordinasi dalam pemberdayaan kelompok tani menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada 20 Mei hingga 25 Juni 2025. Teori yang digunakan mengacu pada konsep koordinasi G.R. Terry dan indikator Hasibuan, yaitu kerjasama, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kerjasama masih bersifat administratif dan tidak adanya nota kesepakatan/*Memorandu of Understanding* (MoU), komunikasi berjalan satu arah, pembagian kerja belum dibakukan secara formal, dan disiplin kegiatan sangat tergantung pada inisiatif individu. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan koordinasi diantara keduanya, perlu dilakukan langkah-langkah seperti pembuatan nota kesepakatan/*Memorandu of Understanding* (MoU), mengadakan forum formal yang dihadiri oleh pemerintah desa, dinas pertanian, PPL, BPP dan Kelompok tani agar komunikasi tidak berjalan satu arah, adanya pembagian kerja yang jelas dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin agar bisa meningkatkan kedisiplinan dan memaksimalkan implementasi program yang dibuat.

Kata kunci: Koordinasi, Pemberdayaan, Kelompok Tani.

ABSTRACT

COORDINATION BETWEEN VILLAGE GOVERNMENT AND THE AGRICULTURAL SERVICE IN EMPOWERING FARMER GROUPS

(Case Study of the Farmers Group in Fajar Jaya Village Lengkiti District

Ogan Komering Ulu Regency)

By : Rio Nusantara

NPM : 2152024

This research is based on the condition of Fajar Jaya Village, where the majority of residents work as farmers; however, not all of them are members of farmer groups. Out of 652 farmers, only 286 are active members, indicating that the empowerment efforts have not yet been optimal. The main issue lies in the ineffective coordination between the Village Government and the Department of Agriculture, marked by weak data synchronization, lack of routine communication, unclear division of labor, and insufficient joint evaluations.

The purpose of this study is to analyze the coordination patterns in empowering farmer groups using a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research was conducted from May 20 to June 25, 2025. The study is based on G.R. Terry's concept of coordination and Hasibuan's indicators: cooperation, communication, division of labor, and discipline.

Based on research results,, it was found that the coordination between the Village Government and the Department of Agriculture is still not optimal. This is due to the fact that cooperation remains administrative in nature and is not supported by a memorandum of understanding (MoU). Communication tends to be one-way, the division of tasks has not been formally established, and the discipline of activities relies heavily on individual initiative. Therefore, to optimize coordination between both parties, several steps need to be taken, such as the establishment of a formal MoU, the organization of formal forums involving the village government, the agricultural department, agricultural extension officers (PPL), agricultural counseling centers (BPP), and farmer groups to ensure two-way communication. Additionally, there should be a clear division of roles signed by both parties, as well as regular monitoring and evaluation to improve discipline and maximize the implementation of agricultural empowerment programs.

Keywords : *Coordination, Empowerment, Farmer Groups*